

**RENCANA KERJA
KECAMATAN JATIREJO KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2026**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN JATIREJO
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut di atas, kami telah berusaha menyajikan Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kecamatan Jatirejo Tahun Anggaran 2026. Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kecamatan Jatirejo Tahun 2026 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini dan semoga Allah SWT. Senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, 06 Agustus 2025



CAMAT JATIREJO

HARFENDY SETIYAPRAJA, S.STP., M.Si

Pembina

NIP. 19851217 200412 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Renstra PD.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	17
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	19
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD.....	20
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	26
BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	27
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	27
3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	27
3.3 Program dan Kegiatan	28
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	34
BAB V Penutup	40
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Rencana Kerja Tahun 2026 Kecamatan Jatirejo merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2026 Kabupaten Mojokerto yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Mojokerto berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Rencana Kerja Tahun 2026 Kecamatan Jatirejo yang selanjutnya disingkat dengan Renja Kecamatan Jatirejo adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Jatirejo Tahun 2021 – 2026.

Adapun proses penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Renja, penyusunan rancangan awal Renja, penyusunan rancangan Renja, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan Rancangan Awal Renja dan penetapan Renja. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah selalu berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Berkaitan dengan penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Rancangan Renja ini merupakan langkah untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto mempunyai

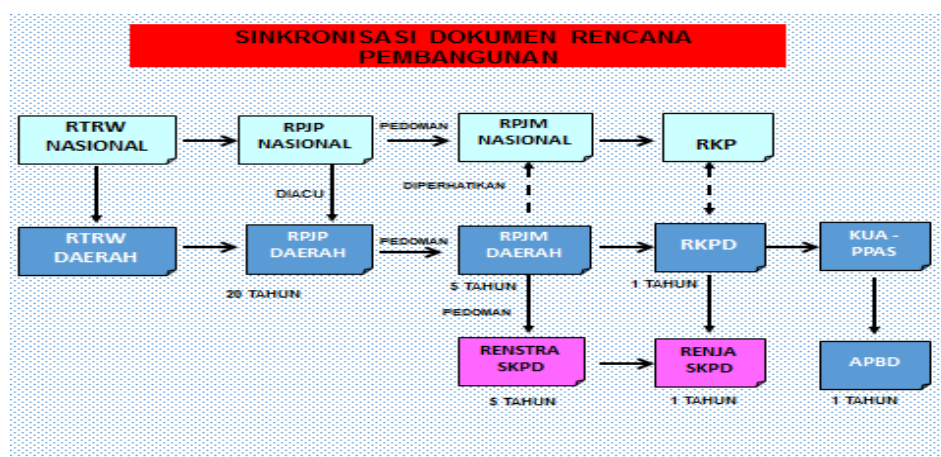
peranan yang penting dan strategis dalam menciptakan aparat yang profesional yaitu berkompeten terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban, netral, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta berwawasan kesatuan dan kebangsaan sehingga dapat melayani masyarakat dan dunia usaha.

Sebagai dokumen perencanaan, Rancangan Renja Kecamatan Jatirejo memuat kebijakan, program kerja prioritas, kegiatan pembangunan beserta pendanaannya sehingga tercipta keselarasan dalam rangka pembangunan Daerah. Rancangan Renja yang merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas, pokok dan fungsi organisasi disusun berdasarkan prinsip-prinsip:

1. Mengacu pada rancangan awal RKPD tahun yang bersangkutan, yang digunakan untuk merumuskan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif;
2. Mengacu pada Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penetapan tujuan, sasaran kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan dan prakiraan maju tahun berikutnya;
3. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya sebagai landasan perumusan kegiatan alternative untuk mencapai sasaran Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Rancangan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya;
4. Sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang dihadapi, perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah serta dapat menjawab berbagai isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Rencana awal Renja Kecamatan Jatirejo yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan RKA Kecamatan Jatirejo.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;
30. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
31. Surat Keputusan Camat Jatirejo Kabupaten Mojokerto Nomor 188.45/35.1/416-310/2024 Tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Periode 2025-2029, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026, dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Pada Kecamatan Jatirejo.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rancangan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 tahun yang ditetapkan dalam RENSTRA Perangkat Daerah 5 tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian program dan kegiatan yang sangat strategis di Perangkat Daerah.

Adapun tujuan penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana.
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program / kegiatan selama 1 tahun oleh Perangkat Daerah.
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil
4. Langkah-langkah / kebijakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannya.
5. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rancangan Renja Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2026 disusun dengan tata urut sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Rancangan Renja Perangkat Daerah serta keterkaitan antara Rancangan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rancangan Renja OPD, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Rancangan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Jatirejo, dengan Rancangan Renja serta tindak lanjut proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan awal Renja Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rancangan awal Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUSI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rancangan Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai landasan menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahunan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rancangan awal Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rancangan awal Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu

penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rancangan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Sajian Tabel TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rancangan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Sajian Tabel TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan Uraian Mengenai:

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Berisikan Uraian mengenai:

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.
- d. Sajian Tabel TC-31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

3.2 Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

Pada Bab ini berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisi penjelasan mengenai: Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan
- Lokasi program/kegiatan
- Total kebutuhan dana / pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

Sajian Tabel TC 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bahwa dalam penyusunan Program dan Kegiatan di Rancangan Renja Perangkat Daerah ini, kami mengacu dan berpedoman pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah ini kami kerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Rancangan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam: “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah.” Sedangkan untuk capaian Renstra Kecamatan Jatirejo pada tahun 2024 pada umumnya tercapai dengan baik. Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Jatirejo tahun lalu dapat dikatakan sudah sangat tinggi dengan target kinerja dapat tercapai 100% dan realisasi anggaran mencapai 92,14%, hal ini menunjukkan bahwa apa yang telah direncanakan dipastikan mendapatkan pendanaan dan dilaksanakan, namun demikian tetap menyesuaikan dengan prioritas dan kemampuan daerah. Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto tahun lalu disajikan dalam tabel sebagai berikut. Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2024 diuraikan sebagaimana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1. Realisasi belanja pada Kecamatan Jatirejo Tahun 2024

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.408.521.434	2.236.313.703	93%	172.207.731
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.500.000	12.500.000	100%	0
1,1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.500.000	7.500.000	100%	0
1,2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	100%	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.135.587.000	1.968.088.413	92%	167.498.587
2,1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.135.587.000	1.968.088.413	92%	167.498.587
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	98.161.300	93.548.300	95%	4.613.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	98.161.300	93.548.300	95%	4.613.000
4,1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	5.991.400	100%	8.600
4,2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.831.100	2.831.000	100%	100
4,3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	29.990.000	100%	10.000
4,4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.500.000	3.500.000	100%	0
4,5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.245.200	2.220.000	99%	25.200
4,6	Penyediaan Bahan/Material	25.585.000	21.015.900	82%	4.569.100
4,7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.000.000	28.000.000	100%	0
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.692.344	99.358.400	100%	333.944
5,1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.076.344	45.742.400	99%	333.944
5,2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	53.616.000	53.616.000	100%	0
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.580.790	62.573.590	100%	7.200
6,1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43370790	43.363.590	100%	7.200
6,2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10800000	10.800.000	100%	0

6,3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8410000	8.410.000	100%	0
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	14.397.400	14.397.400	100%	0
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	14.397.400	14.397.400	100%	0
1,1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	14397400	14.397.400	100%	0
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	260.230.950	259.554.600	100%	676.350
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	260.230.950	259.554.600	100%	676.350
1,1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14.195.400	14.195.400	100%	0
1,2	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	33.477.750	33.027.750	99%	450.000
1,3	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	109.571.800	109.565.800	100%	6.000
1,4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	102.986.000	102.765.650	100%	220.350
Jumlah		2.683.149.784	2.510.265.703	93,56%	172.884.081

Kegiatan review evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun dan telah direncanakan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Capaian Renstra Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun lalu pada umumnya dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat dan disajikan pada hasil pencapaian kinerja atas Indikator Kinerja Program dan Kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan tahun lalu, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana dijabarkan dalam tabel 2.2. (T-C.29) sebagai berikut :

TABEL T-C. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Jatirejo

Lembar : ...

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n- 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n- 1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83	n/a	n/a	n/a	n/a	81.75	n/a	n/a
		Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	100	1 Inovasi	1 Inovasi	100
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target	100%	n/a	100%	100%	100%	100%	n/a	n/a
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perangkat daerah	7 dokumen		2	2	100%	8 Dokumen		

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan		20	20		30 dokumen		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	100%	n/a	96%	96%	100%	90%	n/a	n/a
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang/bulan		19	19		20 orang		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	59	n/a	n/a	85	144%	85.58	n/a	n/a
	Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	23 paket		n/a	n/a		n/a		
	Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	23 orang		n/a	n/a		n/a		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	100%	n/a	100%	100%	100%	100%	n/a	n/a
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	1 paket		1 paket	1 paket	100%	1 paket		
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor disediakan	6 paket		5 paket	5 paket	100%	11 paket		

	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	100%	12 paket		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket		2 Paket	2 Paket	100%	2 paket		
.	Pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 dokumen		3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen		
	Penyediaan bahan/material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	1 paket		1 paket	1 paket	100%	1 paket		
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan			12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	100%	n/a	100%	100%	100%	100%	n/a	n/a
	Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan			24 Laporan	24 Laporan	100%	12 laporan		
	Penyediaan Jasa pelayanan Umum kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa pelayanan Umum kantor disediakan			24 Laporan	24 Laporan	100%	12 laporan		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	n/a	100%	100%	100%	100%	n/a	n/a

	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perijinan kendaraan dan operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya			2 unit	2 unit	100%	2 unit		
	Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi			2 unit	2 unit	100%	2 unit		
	Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/direhabilitasi			30 unit	30 unit	100%	30 unit		
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	85%	n/a	81%	81%	100%	82%	n/a	n/a
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	1550 Pelayanan	n/a	310 Pelayanan	450 Pelayanan	110%	310 Pelayanan	n/a	n/a
	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah laporan pelaksanaan Nonperizinan pada urusan pemerintahan	12 laporan		30 Laporan	30 Laporan	100%	275 laporan		
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	85%	n/a	81%	81%	100%	82%	n/a	n/a

	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	65 fasili-tasi	n/a	13 Fasilitasi	13 Fasilitasi	100%	13 Fasilitasi	n/a	n/a
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan Desa	12 dokumen		8 dokumen	8 dokumen	100%	12 dokumen		
	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa	12 dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	100%	8 dokumen		
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	100%	17 dokumen		
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	100%	19 dokumen		

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Kecamatan Jatirejo sampai dengan Tahun lalu (n-2) pada tabel T-C.29, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada karena semua program dapat terlaksana melebihi target yang ditentukan.

No	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	-	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase realisasi anggaran perangkat daerah	96%	92,16%

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, meliputi :

No	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase indikator Program PD yang Tercapai	-	-
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Indikator PD yang tercapai sesuai target	100%	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	56	85
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase penyediaan administrasi perangkat daerah sesuai kebutuhan	100%	100%

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	100%	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%
2	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang pemerintahan	-	-
	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	13 Fasilitasi	13 Fasilitasi

3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, meliputi

No	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Presentase pelayanan yang terlayani sesuai dengan standar pelayanan	88	88
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelayanan non perizinan dan perizinan yang dilaksanakan sesuai dengan standart pelayanan	310	450

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja Program /Kegiatan,

A. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pada kegiatan ini terdapat 2 indikator yang menjadi target dari Kegiatan dministrasi Keuangan Perangkat Daerah, dari 2 indikator tersebut hanya 1 indikator yang targetnya terpenuhi. Faktor yang menyebabkan terpenuhannya target kinerja tersebut adalah :

- Pelaksanaan sesuai dengan apa yang direncanakan
- Penyusunan Administrasi berjalan dengan baik

Faktor yang menyebabkan 1 indikator tidak memenuhi target yang ditetapkan adalah :

- Adanya pegawai yang pensiun 1 (satu) orang pegawai

5. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja Program /Kegiatan

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pada program ini terdapat beberapa indikator kegiatan yang menunjang terpenuhinya target kinerja yaitu kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut antara lain :

- Penyusunan dokumen perencanaan bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan
- Personil yang menangani dokumen perencanaan sudah sesuai dengan kualifikasi
- Tingkat disiplin ASN Kecamatan Jatirejo sudah baik dengan pengawasan yang dilakukan atas walupun selama pandemi wabah corona absensi kembali menggunakan manual
- Rapat rutin kinerja dilakukan setiap hari awal bulan sebagai pengontrol kinerja setiap ASN di Kecamatan Jatirejo
- Tercukupinya Anggaran Kebutuhan Kantor

B. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Untuk Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa memiliki 2 indikator dimana semua indikator tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut antara lain :

- Terjalin Kerjasama yang baik antara Desa, Muspika, dan Instansi Jajaran Samping dengan Kecamatan Jatirejo
- Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Dinas yang berkaitan, PKH, TKSK, dan Lembaga Masyarakat Lainnya.
- Adanya peran serta masyarakat yang aktif membangun maupun mengawasi jalannya roda pemerintahan.
- Tercukupinya SDM Kecamatan yang menangani bidang-bidang tersebut

6. Faktor-faktor penyebab melebihinya target kinerja Program /Kegiatan

A. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Pada program ini terdapat 1 indikator yang menjadi target dari Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik. Faktor yang menyebabkan melebihi target kinerja tersebut adalah :

- Pelayanan telah berjalan dengan baik sesuai dengan SOP dan standar pelayanan yang diterapkan
- Pelatihan secara internal dari Kasi Pelayanan kepada petugas pelayanan tentang penerapan Pelayanan Prima
- Adanya sarana pengaduan Pelayanan di Kecamatan Jatirejo
- Adanya sanksi bila pelayanan diluar Standar Pelayanan yang ditetapkan

B. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Kegiatan ini merupakan indikator dari Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sehingga keberhasilan atau dari target ini adalah penentu dari Program di atasnya sehingga factor yang menyebabkan melebihi target kinerja sama seperti pada keterangan di atasnya

7. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD adalah: - Meningkatnya kualitas pelayanan di Kantor Kecamatan Jatirejo baik dalam PATEN, maupun dari Bidang lainnya.

- Meningkatnya nilai SAKIP Kecamatan Jatirejo
- Tercukupinya sarana dan prasarana di kantor Kecamatan Jatirejo
- Pembangunan Desa yang cukup merata

8. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya target :

- Menurunkan target capaian realisasi anggaran agar tidak terlalu tinggi sehingga bisa mencapai target yang diinginkan.
- Melakukan rekon dengan kondisi yang mendekati real namun tetap tidak mengindahkan kaidah perencanaan yang baik dan benar.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, maka kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan di Kabupaten Mojokerto, sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten, dengan didukung sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Untuk mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang telah disesuaikan dengan capain indicator Kepala Daerah pada Misi 1 sebagai berikut:

Tabel 2.3.

Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Jatirejo			
No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN
1.	Meningkatnya Kinerja layanan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah kabupaten diperlukan suatu tolak ukur kinerja. Tolak ukur kinerja ini didapat dari suatu penilaian yang sistimatik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Renstra Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto berdasarkan indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel 2.4. (T-C.30) sebagaimana berikut dibawah ini :

Tabel 2.4
(Tabel T-C. 30 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Jatirejo
Kabupaten Mojokerto

NO	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (n-3)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2023 (n-3)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2025 (n)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai IKM			80	81	81	82	81	82	-		baik
2	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan			-	-	-				-		baik
3	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti			80%	81%	81%	82%	81%	82%	81%	82%	n/a
4	Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan			1100 pelayanan	1100 pelayanan	1100 pelayanan	1100 pelayanan			1100 pelayanan	1100 pelayanan	baik
5	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			n/a	50 fasilitasi	38 fasilitasi	37 fasilitasi	n/a	50 fasilitasi	38 fasilitasi	37 fasilitasi	baik
6	Persentase indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	baik
7	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah			90%	90%	79%	79,5%			n/a		n/a
8	Indeks profesionalitas ASN			56,8	77	77,5	78	56,8	77	81%	78	baik
9	Nilai Sakip Perangkat Daerah			83,7	83,9	84,1				81%		baik

10	Nilai RB Perangkat Daerah			70	70,5	71	71,5					
11	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan				1	1	1	100%	100%	1	1	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jatirejo tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh SDM dan Sarana prasarana.

Adanya pertimbangan terkait isu-isu penting ini dilakukan agar selalu ada perbaikan ke depannya sehingga Kecamatan Jatirejo dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan maksimal sehingga tujuan Kecamatan Jatirejo dalam mendukung visi Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto periode tahun 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia” pada misi ke tiga yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan” dapat terwujud dengan maksimal pula.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jatirejo antara lain :

1. Teknologi informasi yang menuntut kesiapan SDM yang handal dan profesional dalam berbagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pengembangan program/kegiatan;
2. Belum memadainya kompetensi beberapa SDM yang ada;
3. Penempatan SDM yang tidak sesuai dengan kompetensi;
4. Kurangnya pengawasan berbasis kinerja hingga menyebabkan tidak meratanya pembagian tugas;
5. Kurang meratanya pembagian kegiatan yang berhubungan langsung dengan kinerja selaku perangkat daerah dan yang tidak berhubungan dengan kinerja selaku perangkat daerah hingga berdampak pada kurang maksimalnya peran Kecamatan Jatirejo terhadap perwujudan pencapaian visi dan misi daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Berdasarkan Rancangan RKPD Tahun 2026 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam membangun kemandirian ekonomi dan sosial budaya yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sinergitas program dengan Pemerintah Pusat. Proses penyusunan RKPD dilaksanakan melalui mekanisme/ tahapan yang diawali dari Musrenbang Tingkat kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten dengan melibatkan

seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang memenuhi tiga prinsip yakni partisipatif, kesinambungan dan keseluruhan (Holistik).

Restrukturisasi Program/Kegiatan sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dalam perumusan program/kegiatan sebagaimana urusan dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dalam undang-undang dimaksud dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Selengkapnya sebagaimana tabel 2.5 (T-C 31) berikut :

Tabel 2.5
(Tabel T-C. 31 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Jatirejo											
NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Jatirejo	-Nilai SAKIP Perangkat Daerah -Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	79 1	2.389.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec Jatirejo	- Nilai SAKIP Perangkat Daerah - Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	79 1	2.662.048.000	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai sesuai Target	100%	10.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai sesuai Target	100%	10.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	6.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	6.000.000	
			Ranwal, rancangan, ranker, renja, renstra, p renja								

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	4.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	4.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	100%	1.965.384.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	100%	2.158.432.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/Bulan	1.965.384.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/Bulan	2.158.432.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		IP ASN Perangkat Daerah	85.00	32.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		IP ASN Perangkat Daerah	85.00	32.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	16 Paket	12.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	16 Paket	12.000.000	
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	23 Orang Pegawai	20.000.000	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	23 Orang Pegawai	20.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	90%	174.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	90%	224.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	6.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	6.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Paket	100.000.000	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 bulan	50.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 bulan	50.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket	5.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket	5.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 Dokumen	3.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 Dokumen	3.000.000	
	Penyediaan Bahan / Material		Jumlah paket bahan/material yang disediakan	1 Paket	30.000.000	Penyediaan Bahan / Material		Jumlah paket bahan/material yang disediakan	1 Paket	30.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	30.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	30.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai Kebutuhan	100%	89.616.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai Kebutuhan	100%	89.616.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	36.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	36.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	53.616.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	53.616.000	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	118.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	148.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 unit	60.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 unit	60.000.000	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	3 unit	40.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	3 unit	70.000.000	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12 Unit	18.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12 Unit	18.000.000	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Jatirejo	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	15.000.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Jatirejo	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	15.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah perijinan dan non perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	500 Pelayanan	15.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah perijinan dan non perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	500 Pelayanan	15.000.000	

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperijinan		Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	12 Laporan	15.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperijinan		Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	12 Laporan	15.000.000	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Jatirejo	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	100%	346.000.000	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Jatirejo	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	100%	371.000.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat	25 Fasilitasi	346.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat	25 Fasilitasi	371.000.000	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	8 Dokumen	45.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	8 Dokumen	70.000.000	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	6 Dokumen	50.000.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	6 Dokumen	50.000.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	7 Dokumen	126.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan	7 Dokumen	126.000.000	

								ketentraman dan ketertiban umum			
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6 Dokumen	125.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6 Dokumen	125.000.000	
					2.750.000.000					3.048.048.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan Ranwal Rencana Kerja Tahun 2026 membutuhkan adanya usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, LSM, asosiasi, Perguruan Tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Mojokerto. Program/kegiatan Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto yang telah diperoleh melalui mekanisme usulan dan penelitian dalam Musrenbang. Selanjutnya dari hasil penelitian dan usulan tersebut diverifikasi terlebih dahulu bersama dengan Bappeda Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto dan pihak pemangku kepentingan, anara lain:

1. Bahwa Usulan Program/Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke forum Musrenbangdes;
2. Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan;
3. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu-isu penting dari masing–masing Perangkat Daerah yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan.

Berikut ini usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan masyarakat dan dunia usaha yang masuk dalam Musrenbang Kabupaten Mojokerto TA. 2024 adalah sebagaimana tabel 2.6 (T-C. 32) berikut :

Tabel 2.6
(Tabel T-C. 32 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan TA. 2026
Kabupaten Mojokerto

Kecamatan Jatirejo

No.	Program/Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti		

	Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		
	Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Masjid Desa	Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Ekor Sapi	Hibah untuk Sapi Kurban

(Sumber : Data Kec. Jatirejo Tahun 2025)

Sebagai wujud tanggung jawab dari pelimpahan Hibah Sapi Kurban dari Bagian Kesra Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Jatirejo menerima satu usulan penerimaan Hibah Sapi Kurban dari Masjid Dusun Bendo Desa Kunitir. Guna menampung Hibah Sapi Kurban, maka diletakkan pada Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan. Sehingga pagu yang dibutuhkan untuk sub kegiatan tersebut menjadi 125.000.000 dibawah Seksi Kemasyarakatan

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan arah kebijakan nasional untuk lebih meningkatkan pelayanan umum pada semua masyarakat di semua lapisan maka semua program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Jatirejo ditujukan untuk meningkatkan nilai indeks pelayananan masyarakat (IKM) Kecamatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Adapun tujuan Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto pada tahun 2026 adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu pada Misi 1 yaitu **Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta menjaga ketentraman masyarakat.**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025 – 2029. Sasaran Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto pada tahun 2026 adalah **Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan**

Adapun target kinerja dari tujuan dan sasaran Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto pada 2025 – 2029 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
Target Kinerja Dari Tujuan Dan Sasaran

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Meningkatnya Kinerja layanan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	93,75	94,00	94,25	94,50	94,75	95,00

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan Kinerja Kecamatan Jatirejo yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran, maka disusun Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Jatirejo Tahun 2026. Renja Kecamatan Jatirejo merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Jatirejo.

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Jatirejo Tahun 2026 mengacu pada Tujuan Kecamatan Jatirejo yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jatirejo untuk 5 Tahun mendatang yaitu **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dari Kecamatan Jatirejo Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH:

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - Evaluasi kinerja perangkat daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Penyediaan Bahan/Material
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
 - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 serta Prakiraan Maju Tahun 2027 sebagaimana tabel 3.2 (T-C.33) sebagai berikut:

Table 3.2 (Tabel T-C. 33 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Perkiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Mojokerto
Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Jatirejo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Unsur Kewilayahan								
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Nilai SAKIP Perangkat Daerah - Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Kec. Jatirejo	79 1	2.714.929.000			79	2.662.048.000
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai sesuai Target		100%	10.000.000			100%	10.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7 dokumen	6.000.000			7 dokumen	6.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Laporan	4.000.000			4 Laporan	4.000.000

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		100%	2.464.929.000			100%	2.464.929.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		16 Orang/ Bulan	2.464.929.000			16 Orang/ Bulan	2.464.929.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah		85.00	32.000.000			85.00	32.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya		15 PNS	12.000.000			15 PNS	12.000.000
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan		23 Orang Pegawai	20.000.000			23 Orang Pegawai	20.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan		90%	90.509.000			90%	224.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		1 Paket	6.000.000			1 Paket	6.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		6 Paket	6.793.000			6 Paket	100.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		12 Paket	27.030.000			12 Paket	50.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan		12 Paket	5.000.000			12 Paket	5.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		3 Dokumen	2.245.200			3 Dokumen	3.000.000
	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan		1 Paket	19.440.800			1 Paket	30.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		12 Laporan	24.000.000			12 Laporan	30.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai Kebutuhan		100%	97.584.000			100%	89.616.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		12 Laporan	43.968.000			12 Laporan	36.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		12 Laporan	53.616.000			12 Laporan	53.616.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik		100%	51.907.000			100%	148.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		2 unit	36.297.000			2 unit	60.000.000

	Operasional atau Lapangan								
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi		3 unit	10.800.000			3 unit	70.000.000
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		12 Unit	4.810.000			12 Unit	18.000.000
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Kec. Jatirejo	100%	15.000.000			100%	15.000.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah perijinan dan non perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan		500 Pelayanan an	10.000.000			500 Pelayanan	15.000.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		12 Laporan	10.000.000			12 Laporan	15.000.000
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	Kec. Jatirejo	100%	225.000.000			100%	371.000.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat		25 Fasilitasi	225.000.000			25 Fasilitasi	371.000.000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa		8 Dokumen	20.000.000			8 Dokumen	70.000.000
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		6 Dokumen	20.000.000			6 Dokumen	50.000.000
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		7 Dokumen	70.000.000			7 Dokumen	126.000.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		6 Dokumen	115.000.000			6 Dokumen	125.000.000
	JUMLAH				2.949.929.000				3.048.048.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rangkaian rencana kerja diawali dengan melakukan pengelolaan perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Di dalam rencana kerja mengemukakan secara eksplisit rencana kerja program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja perangkat daerah tahunan. Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berpedoman pada Rentsra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah harus memperhatikan dan menganalisa rencana kerja beserta pendanaannya berdasarkan capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Di samping itu, Perangkat Daerah mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja serta target kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, rencana yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati

sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja dan target kinerja program pembangunan Perangkat Daerah.

Secara rinci, rumusan perubahan rencana program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto tahun 2026, dapat diuraikan sebagaimana tabel 4.1. berikut

Tabel 4.1
MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2026
KECAMATAN JATIREJO
KABUPATEN MOJOKERTO

NAMA SKPD: KECAMATAN JATIREJO

No	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR			LOKASI	APBD KAB (Rp.)	APBD PROV		USULAN API		
					OUTPUT	OUTCOME	TARGET			SKPD Terkait	Pagu (Rp)	KL	Rp.	E
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,5	Kec. Jatirejo	#####	-	-	-	-	
						Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan bekelanjutan	1							
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang terpenuhi		100%	Kec. Jatirejo	10.000.000	-	-	-	-	
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah		4 Dokumen	Kec. Jatirejo	6.000.000	-	-	-	-	
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		21 Laporan	Kec. Jatirejo	4.000.000	-	-	-	-	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase realisasi Anggaran		92%	Kec. Jatirejo	#####	-	-	-	-	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		20 Orang/bulan	Kec. Jatirejo	2.464.929.000	-	-	-	-	

	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan		90%	Kec. Jatirejo	90.509.000	-	-	-	-	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		1 Paket	Kec. Jatirejo	6.000.000	-	-	-	-	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 Paket		6.793.000					
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan		12 Paket	Kec. Jatirejo	27.030.000	-	-	-	-	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		12 Paket	Kec. Jatirejo	5.000.000	-	-	-	-	
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan		12 Dokumen	Kec. Jatirejo	2.245.200	-	-	-	-	
	7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan		12 Paket	Kec. Jatirejo	19.440.800	-	-	-	-	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	Kec. Jatirejo	24.000.000	-	-	-	-	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan		100%	Kec. Jatirejo	97.584.000	-	-	-	-	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		12 Laporan	Kec. Jatirejo	43.968.000	-	-	-	-	

	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		12 Laporan	Kec. Jatirejo	53.616.000	-	-	-	-	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik		92%	Kec. Jatirejo	51.907.000	-	-	-	-	
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		1 Unit	Kec. Jatirejo	36.297.000	-	-	-	-	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi		3 Unit	Kec. Jatirejo	10.800.000	-	-	-	-	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		8 Unit	Kec. Jatirejo	4.810.000	-	-	-	-	
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	Kec. Jatirejo	10.000.000	-	-	-	-	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan		500 Pelayanan	Kec. Jatirejo	10.000.000	-	-	-	-	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan		19 Laporan	Kec. Jatirejo	10.000.000	-	-	-	-	
3	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	Kec. Jatirejo	225.000.000	-	-	-	-	

	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat		23 Fasilitasi	Kec. Jatirejo	225.000.000	-	-	-	-	
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		3 Dokumen	Kec. Jatirejo	20.000.000	-	-	-	-	
	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Jumlah DokumenSinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		6 Dokumen	Kec. Jatirejo	20.000.000	-	-	-	-	
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		5 Dokumen	Kec. Jatirejo	70.000.000	-	-	-	-	
	7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		11 Dokumen	Kec. Jatirejo	115.000.000	-	-	-	-	
									#####					

BAB V PENUTUP

A. Catatan Penting

Rencana Kerja OPD kecamatan Jatirejo merupakan dokumen awal perencanaan kegiatan pada Kantor Kecamatan Jatirejo untuk tahun 2026. Rancangan ini digunakan sebagai petunjuk teknis dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan yang terangkum dalam kegiatan maupun sub kegiatan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Kecamatan Jatirejo. Guna menunjang keberhasilan maka dalam penyusunan RENSTRA 2021 – 2026 melalui berbagai rapat koordinasi di kantor Kecamatan Jatirejo antara Kasi, Kasubbag, Sekcam dan Camat dalam penentuan Indikator sehingga apa yang tertuang dalam dokumen perencanaan dapat terlaksana dengan benar dan baik.

Sejalan dengan hal tersebut diatas kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan masih mengalami banyak hambatan karena terbatasnya sarana dan prasarana pendukung, kurangnya SDM yang handal, dan terbatasnya anggaran kecamatan sebagai OPD terutama dampak dari Pandemi Covid-19 yang menyebabkan berkurangnya Pendapatan Daerah yang menyebabkan berkurangnya pagu anggaran yang didapat Kecamatan. Untuk mengatasi hal tersebut maka dilakukan pengusulan kembali melalui PAK tahun yang berjalan.

B. Kaidah – kaidah

Pelaksanaan Program dan Kegiatan berdasarkan rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Jatirejo mengacu pada dokumen Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD yang diberikan oleh Tim Anggaran Kabupaten Mojokerto.

C. Rencana Tindaklanjuti

Rencana tindaklanjuti program dan kegiatan Kecamatan Jatirejo pada tahun 2026 dan perkiraan maju tahun adalah meningkatkan koordinasi baik di internal Kecamatan Jatirejo sendiri maupun dengan pihak external. Untuk tetap mendukung terlaksananya kegiatan pada tahun 2026 perlu adanya pengoptimalan dari Seksi maupun Sub Bidang yang membidangi dan berkoordinasi dengan PPTK Kegiatan sehingga bisa menghasilkan realisasi kinerja dan realisasi anggaran seperti apa yang direncanakan. Serta untuk mencapai kinerja yang baik maka dilakukan pembinaan kepada pemerintah Desa dan koordinasi yang baik antar instansi di atas ataupun instansi jajaran samping sehingga tujuan Kecamatan Benar-benar akan terlaksana dengan baik.

Demikian rencana kerja Kecamatan Jatirejo Pemerintah Kabupaten Mojokerto tahun 2026 dan perkiraan maju 2027 yang telah di susun dalam dokumen Renstra. Isu-isu strategi yang di susun sudah memperhatikan kondisi pada tahun-tahun sebelumnya, catatan penting serta program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas. Secara umum semua persiapan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Kecamatan Jatirejo sudah tertuang dalam dokumen Rancangan Awal Ini namun tidak menutup kemungkinan terdapat kekurangan didalamnya yang akan dievaluasi untuk keberhasilan di tahun berikutnya sehingga pelayanan yang diberikan dapat optimal.

Mojokerto, 06 Agustus 2025



CAMAT JATIREJO

HARFENDY SETIYAPRAJA, S.STP., M.Si

Pembina

NIP. 19851217 200412 1 001